Tantangan implementasi keuangan berkelanjutan berbasis ESG pada UMKM di Surabaya Barat

Erlina Dwi Ratnasari, Ulfi Pristiana, IGN Andhika Mahendra, Engrasia Fara Parzana Amabel, Aurelly Amelia Putri
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: erlinadwi@untag-sby.ac.id

,

Abstrack

Sustainable finance is an approach that integrates environmental, social, and governance (ESG) aspects into business activities and financing. In Indonesia, the implementation of sustainable finance continues to be promoted by the Financial Services Authority (OJK) through various regulations and sustainable finance roadmaps. OJK has also developed the Indonesian Sustainable Finance Taxonomy (TKBI), which can be used by businesses of various sizes, including MSMEs. The sample in this research consists of Usaha Mikro Kecil dan Menengah (MSME) players in West Surabaya, which has developed as an area for trade, culinary, and services. MSMEs become one of the main drivers of the local economy. However, the implementation of ESG principles in MSMEs still faces various obstacles. Some common challenges include a low understanding of ESG. The research results can be used as a basis for preparing strategic recommendations to improve MSMEs' readiness in applying ESG principles. The recommendations focus on increasing ESG literacy, strengthening human resource capacity, utilizing technology, expanding access to financing, and enhancing guidance and dissemination of regulations. Overall, these outcomes support the research goal of identifying challenges in ESG implementation and formulating strategies to increase the sustainability of MSMEs in West Surabaya.
Kata kunci: keuangan keberlanjutan, ESQ

A. Latar Belakang Teoritis

Keuangan berkelanjutan *(sustainable finance)* merupakan pendekatan yang mengintegrasikan aspek lingkungan (Environmental), sosial (Social), dan tata kelola (Governance) atau ESG ke dalam aktivitas bisnis dan pembiayaan. Di Indonesia, implementasi keuangan berkelanjutan terus didorong oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui berbagai regulasi dan roadmap keuangan berkelanjutan. OJK juga telah mengembangkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) yang dapat digunakan oleh berbagai skala usaha, termasuk UMKM. Namun implementasinya pada UMKM masih dilakukan secara bertahap karena mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha. UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Di Kota Surabaya, khususnya wilayah Surabaya Barat yang berkembang sebagai kawasan perdagangan, kuliner, dan jasa, UMKM menjadi salah satu penggerak utama ekonomi lokal. Meskipun demikian, penerapan prinsip ESG pada UMKM masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa tantangan yang sering muncul meliputi rendahnya pemahaman mengenai ESG, keterbatasan akses pembiayaan hijau, minimnya pencatatan dan pelaporan keberlanjutan, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya dukungan teknologi dan pendampingan. OJK juga mengakui bahwa pengembangan green financing bagi UMKM masih belum optimal dan perubahan paradigma pelaku usaha menjadi tantangan utama. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penelitian untuk mengidentifikasi tantangan implementasi keuangan berkelanjutan berbasis ESG pada UMKM di Surabaya Barat sehingga dapat dirumuskan strategi yang tepat dalam meningkatkan kesiapan UMKM menuju bisnis yang berkelanjutan.

Konsep Keberlanjutan pada UKM

Keberlanjutan usaha merupakan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan penciptaan nilai dalam jangka panjang dengan memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pada UKM, keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghasilkan laba, tetapi juga kemampuan mempertahankan hubungan dengan stakeholder, mengelola sumber daya secara efisien, memenuhi tuntutan pasar, serta beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. keberlanjutan UKM dapat

dipahami melalui tiga kelompok utama:

A, Environmental

Dimensi environmental berkaitan dengan bagaimana UKM mengelola dampak kegiatan bisnis terhadap lingkungan. Indikator yang dapat digunakan antara lain:efisiensi penggunaan energi; pengurangan limbah; penghematan air; penggunaan bahan baku ramah lingkungan; pengurangan penggunaan plastik; pengelolaan emisi; penggunaan teknologi bersih; praktik ekonomi sirkular.

Kajian mengenai UKM menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya dan penghematan biaya merupakan salah satu pendorong internal penerapan sistem pengelolaan lingkungan, sedangkan keuntungan pasar menjadi salah satu pendorong eksternal.

B. *Social*

Dimensi social berkaitan dengan hubungan UKM dengan manusia dan Masyarakat Indikatornya dapat meliputi:kesejahteraan karyawan; keselamatan dan kesehatan kerja; pengembangan kompetensi karyawan; kesetaraan dan nondiskriminasi; perlindungan konsumen; kualitas produk; hubungan dengan masyarakat; kontribusi sosial.

C. *Governance*

Governance berkaitan dengan bagaimana UKM dikelola. Indikator yang dapat digunakan:transparansi; akuntabilitas; etika bisnis; kepatuhan terhadap peraturan; pengendalian internal; pemisahan fungsi; pengelolaan risiko; pencatatan dan pelaporan keuangan. Dalam perkembangan standar keberlanjutan, aspek governance juga berkaitan dengan bagaimana organisasi mengawasi, mengelola, dan memantau risiko serta peluang keberlanjutan. IFRS S1, misalnya, menempatkan *governance, strategy, risk-management processes, serta performance* sebagai bagian penting dari pengungkapan informasi keberlanjutan.

Stakeholder Theory

Stakeholder Theory berpandangan bahwa perusahaan memiliki hubungan dan tanggung jawab kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap aktivitas perusahaan. Dalam UKM, stakeholder dapat terdiri atas: Pemilik, karyawankonsumen ,pemasio, pemerintah , Masyarakat, Lembaga kjeuangan dan lingkungan. Stakeholder Theory yang dikembangkan oleh Freeman (1984) menyatakan bahwa kelangsungan hidup organisasi dipengaruhi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi tersebut. Teori ini menjelaskan bahwa keputusan perusahaan tidak dapat dilepaskan dari tekanan dan harapan para stakeholder.Dalam penelitian ini, Stakeholder Theory digunakan untuk menjelaskan dua hal. Pertama, sebagai anteseden, yaitu Stakeholder Pressure. Implementasi TBL/ESG pada UKM tidak terjadi secara sukarela karena keterbatasan sumber daya dan rendahnya literasi keberlanjutan. Dibutuhkan tekanan dari stakeholder seperti regulasi pemerintah, tuntutan pelanggan, tekanan kompetitor, dan pengawasan komunitas untuk mendorong UKM mengadopsi praktik ESG (Baah et al., 2021).Kedua, sebagai konsekuensi, yaitu Stakeholder Trust. Ketika UKM telah berhasil mengimplementasikan praktik ESG yang seimbang sesuai prinsip TBL, maka akan tercipta kepercayaan dari para stakeholder. Kepercayaan ini merupakan modal sosial yang penting bagi UKM untuk mendapatkan legitimasi, akses permodalan, dan loyalitas pelanggan (Haryono & Iskandar, 2015). Dengan demikian, Stakeholder Trust merupakan cerminan keberhasilan implementasi TBL/ESG pada UKM.

3. *Triple Bottom Line*

Triple Bottom Line (TBL) *Theory* yang dikemukakan oleh Elkington (1994) menjelaskan bahwa keberlanjutan suatu usaha tidak hanya diukur dari kinerja ekonomi semata (Profit), tetapi juga harus memperhatikan kinerja sosial (People) dan kinerja lingkungan (Planet). Dalam konteks Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pendekatan TBL menjadi relevan karena UKM tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga dituntut untuk bertanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan, keamanan konsumen, dan kelestarian lingkungan sekitar usaha.Konsep Profit dalam TBL tidak hanya berarti laba usaha, tetapi juga mencakup tata kelola usaha yang transparan, akuntabel, dan memiliki legalitas yang jelas. Konsep People mencakup bagaimana UKM memperlakukan karyawan, hubungan dengan pelanggan, dan kontribusi terhadap masyarakat. Sedangkan konsep Planet mencakup upaya UKM dalam mengelola limbah, efisiensi energi, dan

penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan. Dalam perkembangan literatur terkini, ketiga pilar TBL ini dioperasionalkan dalam kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG), di mana ESG merupakan instrumen pengukuran yang lebih konkret dari TBL (Alsayegh et al., 2020).



Gambar 1. *Roadmap* Penelitian

Penelitian Fundamental ini secara umum bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan mendasar serta kesiapan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengimplementasikan prinsip keuangan berkelanjutan berbasis *Environmental, Social, and Governance* (ESG) di wilayah Surabaya Barat. Secara spesifik, tujuan dari pelaksanaan kegiatan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM: Mengetahui dan mengukur sejauh mana pemahaman, pengetahuan, serta persepsi para pelaku UMKM di Surabaya Barat (Kecamatan Sukomanunggal, Tandes, Lakarsantri, Sambikerep, dan Benowo) terhadap konsep keuangan berkelanjutan dan kriteria ESG.
2. Mengidentifikasi Tantangan dan Hambatan Implementasi ESG: Mengidentifikasi secara terperinci berbagai tantangan operasional, finansial, maupun teknis yang dihadapi UMKM dalam menerapkan prinsip ESG, khususnya terkait keterbatasan modal, akses pembiayaan hijau (*green financing*), kualitas SDM, pencatatan/pelaporan keberlanjutan, serta keterbatasan infrastruktur teknologi.
3. Menganalisis Faktor Dominan Penentu Implementasi ESG: Menganalisis dan menguji secara empiris faktor mana yang paling dominan di antara variabel Pemahaman ESG, Akses Pembiayaan, Kesiapan SDM, Dukungan Teknologi, dan Regulasi Pemerintah dalam memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi ESG pada UMKM di Surabaya Barat melalui pendekatan regresi linear berganda.
4. Merumuskan Rekomendasi Strategi Akurat: Merumuskan strategi dan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk meningkatkan kesiapan dan pencapaian keberlanjutan bisnis UMKM menuju era ekonomi hijau (*green economy*)

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survei. Pendekatan ini dipilih untuk mengukur, menganalisis, serta mengidentifikasi tantangan dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi keuangan berkelanjutan berbasis *Environmental, Social, and Governance* (ESG) pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan Surabaya Barat. Lokasi Penelitian berada di wilayah Surabaya Barat yang mencakup 5 (lima) kecamatan utama, yaitu Kecamatan Sukomanunggal, Tandes, Lakarsantri, Sambikerep, dan Benowo. Penelitian dilaksanakan selama 5 (lima) bulan, terhitung mulai bulan Juli sampai dengan November 2026. Populasi Penelitian ini adalah pelaku UMKM aktif yang bergerak di berbagai sektor (seperti perdagangan, kuliner, dan jasa) di wilayah Surabaya Barat. Sampel ditentukan sebanyak 50 hingga 100 pelaku UMKM. Teknik Sampling menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria inklusi sampel sebagai berikut:

1. UMKM telah beroperasi/berjalan minimal selama 2 (dua) tahun.
2. Memiliki legalitas usaha yang jelas (seperti NIB atau izin usaha terkait).
3. Bersedia menjadi responden dalam penelitian.

Variabel yang diuji dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) variabel independen dan 1 (satu) variabel dependen:

Jenis Variabel	Nama Variabel	Indikator Penelitian
Variabel Independen	1. Pemahaman ESG	Pengetahuan dan persepsi pelaku UMKM mengenai konsep ESG.
	2. Akses Pembiayaan	Kemudahan dan ketersediaan dalam memperoleh pembiayaan hijau (*green financing*).
	3. Kesiapan SDM	Kompetensi, keterampilan, dan ketersediaan pelatihan SDM.
	4. Dukungan Teknologi	Penggunaan teknologi pendukung operasional ramah lingkungan.
	5. Regulasi Pemerintah	Pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi keberlanjutan
Variabel Dependen	Implementasi ESG	Penerapan praktik/aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola pada bisnis.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa instrumen:

1. Kuesioner (Angket): Menyebarkan kuesioner terstruktur dengan Skala Likert kepada responden UMKM di lapangan.
2. Wawancara: Melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada pelaku UMKM guna menggali tantangan nyata yang dihadapi.
3. Dokumentasi: Mengumpulkan dokumen pendukung terkait profil UMKM, legalitas, serta data sekunder terkait.
4. Studi Pustaka: Mengkaji regulasi (seperti POJK No. 51/POJK.03/2017 dan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia/TKBI), jurnal ilmiah, dan laporan resmi.

Data yang terkumpul diolah dan dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik melalui tahapan berikut:

1. Uji Kualitas Data:
   a. Uji Validitas: Memastikan instrumen kuesioner tepat dan valid mengukur variabel.
   b. Uji Reliabilitas: Memastikan konsistensi instrumen pengukuran.
2. Statistik Deskriptif: Memberikan gambaran umum karakteristik responden, tingkat pemahaman ESG, dan peta tantangan UMKM.
3. Analisis Regresi Linear Berganda: Menganalisis pengaruh variabel pemahaman ESG, akses pembiayaan, SDM, teknologi, dan regulasi secara parsial (Uji t) maupun simultan (Uji F) terhadap implementasi ESG.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan pengolahan data simulasi 50 responden UMKM, diperoleh gambaran mengenai kondisi Pemahaman ESG, Akses Pembiayaan, Kesiapan, SDM, Dukungan Teknologi, Regulasi Pemerintah, dan Implementasi ESG:

Hasil Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Rata-rata	Keterangan Umum
Pemahaman ESG (X1)	3,48	Cukup baik
Akses Pembiayaan (X2)	3,08	Cukup
Kesiapan SDM (X3)	3,34	Cukup baik
Dukungan Teknologi (X4)	3,20	Cukup
Regulasi Pemerintah (X5)	3,26	Cukup baik
Implementasi ESG (Y)	3,28	Cukup baik

Hasil simulasi menunjukkan bahwa variabel Pemahaman ESG memiliki nilai rata-rata paling tinggi, yaitu sebesar 3,48. Hal ini menunjukkan bahwa responden dalam data simulasi secara umum telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai konsep ESG. Sementara itu, Akses Pembiayaan memiliki nilai rata-rata paling rendah, yaitu 3,08. Hal tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pembiayaan masih menjadi salah satu aspek yang perlu

diperhatikan dalam mendukung penerapan prinsip keberlanjutan pada UMKM. Kesiapan SDM memperoleh nilai rata-rata 3,34, sedangkan Regulasi Pemerintah memperoleh nilai rata-rata 3,26. Dukungan Teknologi memiliki nilai rata-rata 3,20.Variabel Implementasi ESG memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,28, yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip ESG dalam data simulasi berada pada tingkat cukup baik.

1. Identifikasi Tantangan Implementasi ESG
   Berdasarkan hasil simulasi dan fokus penelitian, terdapat beberapa aspek yang dapat menjadi tantangan dalam implementasi ESG pada UMKM.
   - Pertama, akses pembiayaan menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian karena penerapan kegiatan berkelanjutan dapat membutuhkan tambahan sumber daya dan investasi.
   - Kedua, dukungan teknologi masih perlu ditingkatkan agar UMKM dapat menjalankan kegiatan usaha secara lebih efisien dan mendukung praktik yang berorientasi pada keberlanjutan.
   - Ketiga, kesiapan SDM menjadi faktor penting karena penerapan ESG membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk menjalankan praktik keberlanjutan dalam aktivitas usaha.
   - Keempat, pemahaman terhadap ESG perlu terus ditingkatkan agar pelaku UMKM tidak hanya memahami ESG secara konseptual, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kegiatan operasional.
   - Kelima, dukungan dan pemahaman terhadap regulasi pemerintah diperlukan agar pelaku UMKM dapat menyesuaikan aktivitas usahanya dengan kebijakan yang berkaitan dengan keberlanjutan.

   Temuan tersebut sejalan dengan fokus penelitian yang mengidentifikasi rendahnya literasi ESG, keterbatasan modal, keterbatasan akses pembiayaan berkelanjutan, pencatatan keberlanjutan, kualitas tata kelola, serta kurangnya pendampingan sebagai tantangan implementasi ESG pada UMKM.
2. Model Analisis Implementasi ESG
   Penelitian menghasilkan model analisis yang menghubungkan Pemahaman ESG, Akses Pembiayaan, Kesiapan SDM, Dukungan Teknologi, dan Regulasi Pemerintah dengan Implementasi ESG pada UMKM. Model tersebut dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan maupun pengembangan program pendampingan UMKM.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi strategi untuk meningkatkan kesiapan UMKM dalam menerapkan prinsip ESG. Rekomendasi diarahkan pada peningkatan literasi ESG, penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi, perluasan akses pembiayaan, serta peningkatan pendampingan dan sosialisasi regulasi. Secara keseluruhan, luaran tersebut mendukung tujuan penelitian untuk mengidentifikasi tantangan implementasi ESG dan merumuskan strategi peningkatan keberlanjutan UMKM di Surabaya Barat

E. Referensi

Alsayegh, M. F., Abdul Rahman, R., & Homayoun, S. (2020). Corporate Sustainability Performance, Environmental, Social, and Governance (ESG) Disclosure and Its Impact on Financial Performance. *Sustainability*, 12(10), 4190.

Baah, C., Opoku-Agyeman, D., Acquah, I. S. K., Agyabeng-Mensah, Y., & Afum, E. (2021). Examining the influence of stakeholder pressure and environmental sustainability practices on firm performance: The mediating role of green supply chain practices. *Journal of Cleaner Production*, 283, 124628.

Bappenas. (2024). *Rencana Aksi Nasional Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berkelanjutan di Indonesia*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Elkington, J. (1994). Towards the Suitable

Corporation: Win-Win-Win Business Strategies for Sustainable Development. *California Management Review*, 36(2), 90–100.

Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman.

Haryono, A., & Iskandar, D. (2015). Pengaruh Praktik Keberlanjutan Usaha dan Kepercayaan Stakeholder Terhadap Kinerja Usaha Kecil dan Menengah. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 17(2), 115–126.

International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation. (2023). *IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information*. IFRS Foundation.

Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2024). *Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023*. Kemenkop UKM.

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik*. OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025)*.

OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI)*. OJK.

Pemerintah Kota Surabaya. (2023). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Revisi)*. Pemerintah Kota Surabaya.

Pratama, A., & Wijaya, S. (2024). Tantangan dan kesiapan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengadopsi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Berkelanjutan*, 12(2), 145–160.

Rahmawati, F., & Hidayat, R. (2023). Analisis hambatan implementasi green financing pada sektor UMKM di Jawa Timur. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 78–92.

Sari, D. P., & Utama, I. M. (2025). Literasi ESG dan akses pembiayaan hijau bagi pelaku UMKM di kawasan perkotaan. *Kajian Ekonomi Nusantara*, 9(3), 210–225.

World Bank. (2022). *Sustaining growth: Integrating ESG into small and medium enterprise finance in emerging markets*. World Bank Group.